
Analisis kemandirian keuangan daerah

Aris Rante¹, Muhammad Saleh Mire², Ardi Paminto³

Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

¹Email: aris.rante@mhs.feb.unmul.ac.id

²Email: muhammad.saleh.mire@feb.unmul.ac.id

³Email: ardi.paminto@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Path Analysis (Path Analysis). Data yang digunakan adalah data sekunder pada periode 2005 sampai 2014. Teori yang digunakan adalah teori teori pengeluaran publik, investasi. Analisis tersebut menemukan bahwa: Efek langsung langsung Shop tidak signifikan terhadap PDB. Belanja Dampak langsung tidak langsung secara signifikan terhadap PDB. Efek langsung Pemerintah Daerah secara langsung tidak signifikan terhadap PDB. Belanja Langsung dan Pengeluaran Tidak Langsung berdampak langsung secara signifikan pada Tingkat Desentralisasi Fiskal Efek Bersifat Ekuitas Daerah secara langsung tidak signifikan terhadap PDB Tingkat Desentralisasi Fiskal dan dampak langsung tidak signifikan terhadap tingkat Desentralisasi Fiskal di Malinau.

Kata Kunci: Belanja langsung dan beban tidak langsung

Analysis of regional financial independence

Abstract

The analysis model used in this research is using Path Analysis (Path Analysis). The data used is secondary data in the period 2005 to 2014. The theory used is the theory of the theory of public expenditures, investments. The analysis finds that: Shop Direct direct effect is not significant to the GDP. Shopping Indirect direct impact significantly to the GDP. Local Government Equity direct effect is not significant to the GDP. Shopping Direct and Indirect Expenditures direct impact significantly on Fiscal Decentralization Degree of Regional Government Equity direct effect is not significant to the GDP Degree of Fiscal Decentralization and direct impact not significant to the degree of Fiscal Decentralization in Malinau.

Keywords: *Direct shopping and expense no direct*

PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, akuntabilitas serta *value for money* (efektif, efisien dan ekonomis) sebagai alat mewujudkan akuntabilitas publik (*accounting for governance*).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi daerah. Arsyad (2010:374), mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Didukung oleh pernyataan Kuncoro (2004:114) bahwa sasaran fundamental pembangunan ekonomi daerah yang berusaha hendak dicapai oleh banyak daerah salah satunya adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Peran pemerintah dalam perekonomian adalah menanggulangi kegagalan pasar (*market failure*) dan meningkatkan pemerataan. Campur tangan atau peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah tercermin melalui anggaran belanja daerah/publik. Jhingan (2008:388) menyatakan bahwa peranan belanja negara/publik terletak di dalam peningkatan laju pertumbuhan perekonomian, penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran, mendorong inisiatif dan usaha swasta dan dalam mewujudkan keseimbangan regional di dalam perekonomian.

Pada awal masa diberlakukannya otonomi daerah terutama untuk beberapa daerah otonom baru seperti Kabupaten Malinau, peranan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menyediakan prasarana dan sarana publik sebagai akses distribusi faktor-faktor produksi dan modal untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan model pembangunan yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (2012:169) bahwa pada tahapan awal pembangunan ekonomi, presentase pengeluaran pemerintah terhadap total investasi adalah besar karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasana seperti kesehatan, pendidikan, sarana transportasi dan lainnya.

Pengalokasian APBD untuk pengeluaran daerah yang didistribusikan pada sektor-sektor pembangunan akan mendorong pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berkembangnya kegiatan produksi di daerah dengan adanya kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah akan meningkatkan investasi yang masuk ke daerah tersebut yang pada akhirnya laju pertumbuhan perekonomian daerah makin meningkat pula.

Peningkatan perekonomian daerah dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode. Penyerapan anggaran daerah akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan mendistribusi pemerataan pendapatan masyarakat. Secara eksplisit dinyatakan bahwa pengeluaran publik bagi masyarakat lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah daripada oleh pemerintah pusat karena daerah lebih mengetahui kondisi dan potensi di daerahnya.

Menurut Badrudin (2012:20), menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berupa belanja rutin (belanja aparatur/belanja tidak langsung) dan belanja pembangunan (belanja publik/belanja langsung) akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang kemudian direspon oleh produsen. Berdasarkan kegiatan konsumsi dan produksi, akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai absolut PDRB dan nilai relatif perubahan PDRB yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Malinau melalui realisasi belanja daerah terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana publik untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Kabupaten Malinau. Komitmen pemerintah Kabupaten Malinau untuk meningkatkan perekonomian daerah telah menjadi salah satu prioritas

pembangunan daerah dalam APBD. Sejak menjadi daerah otonomi, pengembangan perekonomian daerah telah menjadi salah satu misi utama pembangunan daerah Kabupaten Malinau.

Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki tolak ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan realisasi anggaran dalam pembangunan ekonomi daerah. Tolak ukur tersebut adalah meningkatnya pertumbuhan PDRB dan meningkatnya potensi sumber daya ekonomi lokal yang diukur dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Adanya ukuran keberhasilan pelaksanaan anggaran menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Malinau telah menganut prinsip *value for money* dan kesungguhan pemerintah Kabupaten Malinau mencapai tujuan otonomi daerah.

Tabel 1. Nilai PDRB, Pertumbuhan Ekonomi Serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malinau 5 Tahun terakhir

| Tahun | PDRB Kab (Miliar Rp) | Pertumbuhan Ekonomi (%) | Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rp) |
|-------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 2010 | 693.737 | 14,27 | 84.642.440.637 |
| 2011 | 772.460 | 11,25 | 91.486.422.151 |
| 2012 | 858.802 | 11,80 | 112.425.816.954 |
| 2013 | 936.311 | 9,03 | 93.877.563.536 |
| 2014 | 1.043.311 | 9,98 | 104.239.195.294 |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah & BPS Malinau (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan masing – masing perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi Serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan nilai yang cenderung mengalami peningkatan, sedangkan nilai Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau memiliki nilai yang cenderung mengalami fluktuatif.

Kenyataan adanya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau, namun hal tersebut belum mampu dilakukan pemerintah di Kabupaten Malinau. Pemerintah akan melakukan pengeluaran sebagai langkah untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut.

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah dan realisasi APBD bukanlah masalah yang signifikan karena pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran rutin dan belanja pembangunan kepada pemerintah daerah setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti menggunakan objek pengeluaran daerah yang meliputi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal serta PDRB sebagai obyek penelitian. Semakin besar proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah dan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pengeluaran daerah diasumsikan kemandirian fiskal Kabupaten Malinau semakin baik.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Desentralisasi Fiskal

Menurut Mardiasmo (2006:1) bahwa pemberian otonomi daerah berimplikasi terhadap penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Secara harfiah kata desentralisasi adalah lawan kata sentralisasi yang dapat diartikan sebagai suatu pemusatan (adjective) berkaitan dengan suatu kewenangan (authority) pemerintahan. Menurut Rahayu (2010:115-116) terdapat beberapa konsep desentralisasi, yaitu:

- Desentralisasi administratif (*administrative decentralization*).
- Desentralisasi politik (*political decentralization*)
- Desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*)
- Desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*)

Desentralisasi administratif adalah pelimpahan sebagian wewenang dan pertanggungjawaban dibarengi dengan pemberian wewenang untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan pelayanan publik (public service). Pelimpahan wewenang tersebut berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen urusan pemerintahan dan bidang keuangan (financial management) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (local government). Dalam sistem desentralisasi administratif yang terjadi di Indonesia terdapat tiga bentuk yakni dekonsentrasi, desentralisasi atau otonom dan bantuan (medebewind).

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Agar dapat mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah, dan seberapa efektifnya target target perencanaan terhadap realisasinya.

Menurut Madiasmo (2002:14), ada beberapa referensi yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1) Rasio Kemandirian :

Rasio ini juga menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana luar atau eksternal . Dalam penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat Pemerintah} + \text{Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

2) Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan dapat mendukung otonomi daerah (Madiasmo, 2002:17), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{KKDT} = \frac{\text{TPD}_t}{\text{TBD}_t} \times 100\%$$

Di mana:

KKDt = kemampuan keuangan daerah dalam persen

TPDt = total pendapatan daerah tahun t

TBDt = total belanja daerah tahun t

3) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan.:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Kinerja Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa APBD disusun berdasarkan anggaran berbasis prestasi kerja/kinerja (performance budgeting), yang merupakan integrasi antara sistem penganggaran dengan sistem akuntabilitas kinerja. Performance budgeting pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Anggaran berbasis prestasi kerja mengutamakan pencapaian hasil kerja (output) yang dapat diukur dengan indikator kinerja tertentu dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan (input). Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Mardiasmo (2006:6) menjelaskan bahwa konsep pengelolaan keuangan berbasis kinerja disebut sebagai Value for money (VFM) berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros. Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk

mencapai output tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Agar dapat mengukur kinerja atas pelaksanaan APBD, maka pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana kerja berisikan target kinerja pembangunan daerah yang diinformasikan dalam satuan anggaran daerah.

Menurut Badrudin (2010:254) bahwa hasil analisis rasio keuangan APBD suatu daerah dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam rangka:

- a) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
- b) Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;
- c) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah;
- d) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; dan
- e) Melihat pertumbuhan/peembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Kinerja keuangan daerah yang dilihat dari sisi penerimaan (fiscal availability) adalah kemampuan daerah yang tersedia murni dari PAD. Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah menunjukkan kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Formulasi Derajat Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan oleh Halim (2007:262), Tangkilisan (2007:77) dan Mahmudi (2010:142) adalah sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Kerangka konseptual dapat diinterpretasikan bahwa pengeluaran daerah yang meliputi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah akan mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian yang Digunakan

Rancangan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan permodelan ekonometrika regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah yang meliputi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta rasio kinerja keuangan daerah yakni Derajat Desentralisasi Fiskal.

2. Definisi Operasional

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, hipotesis yang didukung dengan tinjauan pustaka yang diperlukan, maka variabel- yang dipergunakan diberikan batasan/definisi sebagai berikut:

- 1) **Belanja Langsung (X₁)** adalah pengeluaran pemerintah daerah yang terkait langsung penggunaannya untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah di Kabupaten Malinau tahun 2005-2014 (dalam rupiah)
- 2) **Belanja Tidak Langsung (X₂)** adalah pengeluaran pemerintah daerah yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. di Kabupaten Malinau tahun 2005-2014 (dalam rupiah).
- 3) **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (X₃)** adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk investasi jangka panjang pada perusahaan daerah maupun lembaga perbankan dalam rangka mendapatkan keuntungan ekonomi.
- 4) **Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB (Y₁)** adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai komponen permintaan akhir pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu.

- 5) **Derajat Desentralisasi Fiskal atau DDF (Y_2)** adalah angka rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) yang menggambarkan kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber penerimaan daerah.

3. Model Analisis

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel Belanja Tidak Langsung, Belanja langsung, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kaitannya dengan Derajat Desentralisasi Fiskal menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan permodelan ekonometrika.

Menurut Riduwan dan Sunarto (2009:139) menjelaskan pengertian path analysis oleh Bohrnstedt (1974 dalam Kusnendi, 2005) adalah path analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen).

Adapun asumsi yang mendasari path analysis adalah sebagai berikut:

- Hubungan antar variabel bersifat linier, adaptif dan bersifat normal.
- Hanya sistem aliran kausal ke satu arah artinya tidak ada arah kausalitas yang berbalik.
- Variabel terikat (endogen) minimal dalam skala ukur interval atau rasio.
- Menggunakan sampel probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
- Observed variables diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan reliable) artinya variabel yang diteliti dapat diobservasi secara langsung.
- Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar berdasarkan teori dan konsep-konsep yang relevan.

Langkah-langkah analisa jalur (path analysis) Riduwan dan Sunarto (2009:148-149) adalah sebagai berikut:

- Membuat paradigma penelitian atau kerangka konsep
- Merumuskan masalah penelitian
- Membuat model hipotesis
- Membuat diagram jalur dan persamaan struktur

Menurut Riduwan dan Sunarto (2009:141) bahwa persamaan struktural atau model struktural dalam diagram jalur yaitu apabila setiap variabel terikat/endogen ditentukan keadaannya oleh seperangkat variabel bebas/eksogen sebagai berikut:

- Melakukan perhitungan kesesuaian model struktural atau uji asumsi klasik (goodness of fit)
- Melakukan pengujian tiap hipotesis untuk tiap sub-struktur
- Menghitung pengaruh kausal antar variabel secara proporsional, yaitu menghitung pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Belanja Langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Malinau.

Hasil analisis substruktur pertama menunjukkan bahwa Belanja Langsung berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Malinau.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Purnama (2010), yang mana hasilnya menunjukkan bahwa belanja langsung berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tidak signifikan pengaruh belanja langsung ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja langsung yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malinau belum menunjukkan pengeluaran atau belanja yang efektif dan efisien.

Nilai belanja langsung yang merupakan pengeluaran pemerintah menurut penulis dapat diartikan sebagai tanggungjawab pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah, karena sejak diberlakukannya otonomi daerah Pemda diberi hak dalam menentukan prioritas kegiatan dan program yang akan dilakukan. Selain itu Belanja Daerah juga dapat mencerminkan peran pemerintah dalam

pembangunan daerah, lebih banyak dalam biaya operasional rutin berupa Belanja Pegawai atau lebih berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana dalam memperlancar kegiatan ekonomi sekaligus berpotensi dalam menarik investor.

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai seperti alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

2. Pengaruh Belanja Tidak Langsung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Malinau.

Hasil analisis substruktur pertama menunjukkan bahwa Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Malinau.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Nugroho (2008), yang mana hasilnya menunjukkan bahwa belanja daerah dalam bentuk belanja tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hasil di atas menunjukkan bahwa belanja pemerintah Kabupaten Malinau dalam bentuk belanja tidak langsung yang berupa belanja aparatur mampu mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Malinau.

Hal ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Soepangat (1991) dalam Badrudin (2012:64) bahwa peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan nasional. Badrudin (2012:20) juga menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berupa belanja rutin (belanja aparatur/belanja tidak langsung) akan membentuk nilai absolut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai relatif perubahan PDRB yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

3. Penyertaan Modal Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Malinau.

Hasil analisis substruktur pertama menunjukkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Malinau.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Palupi (2001), yang mana hasilnya menunjukkan bahwa investasi pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berpengaruh positif namun tidak secara signifikan (parsial) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini disebabkan karena Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan salah satu kegiatan investasi keuangan pemerintah daerah lebih bersifat mencari keuntungan (profit oriented) yang ditujukan untuk menambah sumber pendapatan daerah dari bagi hasil laba deviden pada lembaga perbankan daerah maupun BUMD.

4. Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Malinau

Hasil analisis substruktur kedua menunjukkan bahwa Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Malinau.

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal. Belanja Tidak Langsung adalah pengeluaran pemerintah daerah yang

berhubungan langsung dan tidak langsung dengan program dan kegiatan pemerintah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta belanja publik.

Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal dikarenakan pemerintah Kabupaten Malinau memprioritaskan Belanja Langsung untuk membangun infrastruktur (fisik). Pembangunan infrastruktur antara lain seperti pembangunan jalan, perhubungan, gedung sekolah, gedung perkantoran dan fasilitas umum lainnya. Prioritas penggunaan Belanja Langsung untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan akses pelayanan publik merupakan fungsi pemerintah Kabupaten Malinau sebagai agen pembangunan. Meningkatnya akses pelayanan publik diharapkan akan meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat yang berdampak meningkatnya sumber penerimaan pendapatan daerah

Hasil analisis tersebut sesuai dengan model pengembangan pembangunan oleh Musgrave dan Rostow dalam Mangkoesobroto (2012:170), bahwa tahapan pembangunan di Kabupaten Malinau adalah tahap awal, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi adalah besar dikarenakan pada tahap ini pengeluaran pemerintah dititikberatkan dalam penyediaan infrastruktur.

Peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi akan berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini didukung dengan pendapat Arsyad (2010:326) yang mengemukakan bahwa satu-satunya jalan memutuskan ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar kawasan Indonesia adalah meningkatkan kualitas SDM

Menurut Arsyad (2010:327) juga mengemukakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan langkah awal pembangunan daerah sebelum membenahi bidang lain termasuk ekonomi dan sosial sebagai sarana mobilitas faktor-faktor produksi. Diharapkan, dengan tersedianya prasarana dan sarana yang memadai akan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri atau derajat desentralisasi fiskal.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Nugroho (2008), yang mana hasilnya menunjukkan bahwa belanja daerah dalam bentuk belanja langsung berpengaruh positif signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.

Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan bahwa Belanja Tidak Langsung termasuk pengeluaran pemerintah untuk kegiatan konsumsi pemerintah. Belanja Tidak Langsung yang direalisasikan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai dalam konteks perekonomian makro, termasuk kategori pendapatan rumah tangga (masyarakat) menjadi pendapatan per kapita.

Pendapatan rumah tangga yang diterima tersebut akan mendorong meningkatnya pajak daerah sebagai akibat kegiatan konsumsi barang dan jasa yang dilakukan, serta meningkatnya retribusi daerah sebagai akibat penggunaan jasa dan fasilitas pelayanan publik dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat Peacock dan Wisemen dalam Mangkoesobroto (2012:174) bahwa meningkatnya pendapatan perkapita mengakibatkan penerimaan pemerintah yang semakin besar.

Hasil analisis tersebut juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sukirno (2000:151) bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam siklus aliran pendapatan. Salah satunya adalah pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Nugroho (2008), yang mana hasilnya menunjukkan bahwa belanja daerah dalam bentuk belanja tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal (PDRB).

5. Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Malinau.

Hasil analisis substruktur kedua menunjukkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Malinau.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau diberikan kepada lembaga daerah yakni BUMD di Kabupaten Malinau. Posisi perusahaan daerah atau BUMD di era otonomi sebenarnya sangat penting dan strategis sebagai salah satu institusi milik daerah dalam

meningkatkan penerimaan PAD (Derajat Desentralisasi Fiskal). Namun pada kenyataannya seringkali perusahaan daerah merugi bahkan memiliki hutang.

Hasil analisis tersebut sejalan dengan pendapat Kuncoro (2004:13) bahwa salah satu penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga terjadinya ketergantungan fiskal adalah kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Menurut Saragih (2003:72), tidak berperannya BUMD karena pengelolaan keuangan tidak dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel sebagaimana perusahaan swasta lainnya serta bermanfaat bagi masyarakat lokal baik langsung maupun tidak langsung.

Kenyataan yang terjadi selama ini bahwa BUMD di Kabupaten Malinau belum memberikan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malinau. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Malinau tahun audited (BPK), bahwa sumbangan yang paling besar pendapatan daerah di Kabupaten Malinau terserap dari Dana Transfer atau Dana Perimbangan, hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan pemerintah Kabupaten Malinau terhadap pemerintah pusat.

Pendapat yang dikemukakan oleh Saragih (2003) dan Kuncoro (2010) serta kenyataan kurangnya berperannya BUMD sebagai sumber pendapatan daerah bahkan merugi mendukung hasil analisis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.

Menurut pendapat Jhingan (2008), Arsyad (2010), Rahayu (2010) dan Adisasmita (2011) bahwa peranan pemerintah daerah mutlak diperlukan dalam pembangunan ekonomi daerah. Peranan pemerintah daerah tersebut tergambar dalam kebijakan fiskal kewilayahan (regional fiscal policy) melalui anggaran belanja publik (pusat dan daerah). Sistem pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah menetapkan belanja daerah adalah pengeluaran daerah yang berdasarkan jenis belanja diklasifikasikan sebagai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Termasuk dalam kategori pengeluaran daerah adalah pengeluaran pembiayaan yakni investasi pemerintah daerah berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD maupun lembaga perbankan daerah.

6. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Malinau.

Hasil analisis substruktur kedua menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Malinau.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Nugroho (2008), yang mana hasilnya menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Malinau.

Menurut Saragih (2003:17), bahwa desentralisasi fiskal seharusnya mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal juga berfungsi sebagai retribusi pendapatan dan alokasi sumber daya bagi daerah. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa wewenang pemerintah pusat yang sangat besar di masa lalu ternyata tidak hanya berdampak positif bagi pembangunan, tetapi juga menimbulkan efek negatif antara lain pertumbuhan ekonomi daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang relatif lamban.

Tidak signifikannya pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu wujud desentralisasi fiskal belum dapat mengambil peran yang signifikan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan pemerintah Kabupaten Malinau masih sangat bergantung pada bantuan keuangan pemerintah pusat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja Langsung berpengaruh secara langsung tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Malinau.
2. Belanja Tidak Langsung berpengaruh secara langsung signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Malinau.

3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berpengaruh secara langsung tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Malinau.
4. Belanja Langsung berpengaruh secara langsung signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Malinau.
5. Belanja Tidak Langsung berpengaruh secara langsung signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Malinau.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berpengaruh secara langsung tidak signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Malinau.
7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara langsung tidak signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Malinau.
8. Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2003, *Keuangan Negara*, Undang-Undang Nomor 17
- Anonim, 2004, *Pemerintahan Daerah*, Undang-Undang Nomor 32
- Anonim, 2004, *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Undang-Undang Nomor 34
- Anonim, 2005, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Peraturan Pemerintah Nomor 58
- Anonim, 2006, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
- Adisasmitha, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Adisasmitha, Rahardjo, 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Akai, N. dan Sakata M. 2002, *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State – Level Cross Section Data for the United States*, *Journal Urban Economics*, LII: 93-108
- Arsyad, Lincolin, 2005, *Ekonomi Daerah, Pengantar Perencanaan Pembangunan*, Edisi Kedua, BPFY Yogyakarta
- Arsyad, 2010, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima, Unit Penerbit dan Percetakan STIM YPKN, Yogyakarta
- Badrudin, Rudi, 2012, *Ekonomika Otonomi Daerah*, Edisi 1, UPP STIM YPKN, Yogyakarta
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Baswir, Revrison. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Due, John F, and Friedlaeder, Ann F, 1981. *Government Finance*. 7th Edition (Edisi Terjemah Suryono) Richard D, Inc New York.
- Erwinsyah, 2006. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Penelitian Terdahulu. Tesis
- Ghozali, Imam, 2012, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Gujarati, N. Damodar, 2006, *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 1*, Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Halim, Abdul, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

-
- Halim, Abdul, 2010, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Halim, Abdul, 2012, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Hasan, M. Iqbal, 2005, *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Infefensif)*, Edisi Kedua, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Jhingan, M.L., 2008, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Kaho, Y. R., 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2009, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 3, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.
- Kusnendi. 2005. *Model-Model Persamaan Struktural*. Bandung. Alfabeta
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 2012, *Ekonomika Publik*, Edisi Ketiga, BFE, Yogyakarta.
- Mustopadidjaya. AR, 1997. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nugroho 2008. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur*, Penelitian Terdahulu. Tesis
- Oates, W. E., 1993. *Fiscal Decentralization and Economic Development*, National Tax Journal, LXVI (2):237-43
- Palupi, 2001. *Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (studi kasus di kabupaten Purworejo)*, Penelitian Terdahulu. Tesis
- Priyatno, Dwi, 2013. *Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS*, PT. Buku Seru, Jakarta
- Rahayu, Ani Sri, 2010, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Riduwan dan Sunarto, 2009, *Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis*, Alfabeta, Bandung
- Saragih, Juli Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia, Jakarta.
- Said. Zainal, 2008. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Siahaan, Marihot P., 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sukirno, Sadono, 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sumarsono, Sonny, 2009. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Suparmoko, M, 2000. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta
- Suparmoko, 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, CV. Andi Offset, Yogyakarta
-

-
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2007, *Manajemen Publik*, Cetakan Kedua, PT. Grasindo, Jakarta. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara.
- Wibowo, Puji, 2008, *Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, Jurnal Keuangan Publik Vol. 5 No. 1, Jakarta
- World Bank, 2003, *Desentralizing Indonesia: A Regional Public Expenditure Review Overview Report*, Report No. 26191-IND
- World Bank, 2003, *Kota-Kota dalam Transisi: Tinjauan Sektor Perkotaan pada Era Desentralisasi di Indonesia*, Working Paper No. 7